P-ISSN: 1421-8594 Vol. 4, No. 1, April 2026
Received: 03 Desember 2025 | Accepted: 03 Februari 2025 | Published: 20 April 2026

Kemiskinan Ekstrem di Nusa Tenggara Timur: Analisis Wacana Kritis atas Data, Kebijakan, dan Relasi Kuasa

Aprianus Paskalius Taboen[1], Hotlif A. Nope[2], Imelda Nahak[3]

[123]Dosen Sosiologi FISIP Universitas Nusa Cendana

Email: [1]aprianus_taboen@staf.undana.ac.id, [2]hotlifenope@staf.undana.ac.id,

[3]imelda_nahak@staf.undana.ac.id

Abstrak

Artikel ini mengkaji kemiskinan ekstrem di Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Analisis Wacana Kritis (*Critical Discourse Analysis/CDA*) Norman Fairclough yang dipadukan dengan data statistik resmi. Target nasional Indonesia "nol kemiskinan ekstrem pada 2024," yang didasarkan pada standar US$1,90 PPP milik Bank Dunia, cenderung mereduksi realitas kompleks menjadi angka-angka yang disederhanakan. Dengan menganalisis dokumen kebijakan, laporan statistik, serta media daring nasional dan lokal periode 2023–2025, studi ini menemukan bahwa leksikon teknokratis, metafora politik, dan struktur kalimat pasif memperkuat narasi yang berpusat pada negara sekaligus mengaburkan kerentanan struktural di NTT. Produksi wacana didominasi oleh lembaga-lembaga pusat seperti BPS, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), dan Gugus Tugas P3KE. Media nasional umumnya menonjolkan capaian statistik, sementara media regional mengungkap disparitas serta pergulatan di tingkat komunitas. Pada level sosial, kemiskinan ekstrem di NTT dibentuk oleh ekonomi subsisten yang rapuh, keterbatasan akses terhadap layanan dasar, dan politik berbasis target yang berfungsi sebagai instrumen legitimasi politik. Dinamika ini menunjukkan bentuk "fetisisme statistik," di mana angka lebih diprioritaskan dibandingkan realitas yang dialami masyarakat. Studi ini merekomendasikan penggunaan pendekatan berbasis kapabilitas, partisipatif, dan multidimensional agar lebih mencerminkan konteks lokal dan meningkatkan efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Kata Kunci: kemiskinan ekstrem, Analisis Wacana Kritis, NTT, kebijakan pembangunan, representasi statistik

Abstract

This article examines extreme poverty in East Nusa Tenggara (NTT) through Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis (CDA) combined with official statistical data. Indonesia's national target of "zero extreme poverty by 2024," based on the World Bank's US$1.90 PPP standard, tends to reduce complex realities into simplified figures. By analyzing policy documents, statistical reports, and national as well as local online media from 2023–2025, the study finds that technocratic lexicons, political metaphors, and passive sentence structures reinforce state-centered narratives while obscuring structural vulnerabilities in NTT. Discourse production is dominated by central institutions such as BPS, the Coordinating Ministry for Human Development and Cultural Affairs (Kemenko PMK), and the P3KE Task Force. National media generally highlight statistical achievements, whereas regional media reveal disparities and community-level struggles. At the social level, extreme poverty in NTT is shaped by fragile subsistence-based economies, limited access to basic services, and target-driven politics that serve as instruments of political legitimacy. These dynamics demonstrate a form of "statistical fetishism," where numbers are prioritized over lived realities. The

Received: 03 Desember 2025 | Accepted: 03 Februari 2025 | Published: 20 April 2026

study recommends adopting capability-based, participatory, and multidimensional approaches to better reflect local contexts and enhance the effectiveness of poverty alleviation policies.

Keywords: extreme poverty, Critical Discourse Analysis, NTT, development policy, statistical representation

PENDAHULUAN

Kemiskinan ekstrem telah menjadi salah satu isu sosial-ekonomi paling mendesak di Indonesia, mendapatkan prioritas dalam kebijakan pembangunan nasional periode 2020–2024. Pemerintah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem (*zero extreme poverty*) pada akhir 2024, dengan acuan standar baku internasional sebesar US$ 1,90 per hari (PPP), yang digunakan untuk mendefinisikan kemiskinan absolut. Komitmen ini mencerminkan bukan hanya aspirasi kebangsaan, tetapi juga pengakuan atas dampak mendalam kemiskinan ekstrem terhadap kualitas hidup, akses pendidikan, kesehatan, dan kohesi sosial. Dalam kerangka akademik, pengukuran melalui batas US$ 1,90 (PPP) adalah bentuk aktualisasi dari definisi kemiskinan ekstrem menurut Bank Dunia, yang telah banyak digunakan sebagai tolok ukur global (World Bank, 2015).

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan wilayah prioritas karena memiliki prevalensi kemiskinan yang tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS, 2025) mencatat bahwa pada September 2024 angka kemiskinan umum di NTT mencapai 19,02% atau setara dengan sekitar 1,11 juta orang. Sementara itu, berdasarkan estimasi dari Satuan Tugas Pengelola Data yakni Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem atau disingkat P3KE (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2023), tingkat kemiskinan ekstrem di NTT pada Maret 2023 tercatat sebesar 3,93%, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Angka-angka tersebut sering menjadi fokus media dan kebijakan, namun belum sepenuhnya mencerminkan kerentanan dan ketidaksetaraan di ranah komunitas lokal.

Walaupun persentase kemiskinan ekstrem kurang dari 5% mungkin tampak relatif kecil, kenyataannya jauh lebih kompleks. Kekurangan akses terhadap layanan dasar, kondisi infrastruktur yang terbatas, ketergantungan masyarakat terhadap pertanian subsisten, serta pengaruh kekuasaan lokal dan struktur sosial yang timpang memperparah situasi. Dalam wacana publik, kelemahan statistik ini sering kali disederhanakan menjadi angka akhir, tanpa mempertimbangkan dimensi kekuasaan, stigma, maupun resistensi sosial-ekonomi yang muncul di lapangan. Ini menjadi

Received: 03 Desember 2025 | Accepted: 03 Februari 2025 | Published: 20 April 2026

sebuah masalah representasi yang kritis ketika dihadirkan dalam analisis wacana sosial.

Berbagai kajian sebelumnya telah memetakan kondisi kemiskinan di NTT melalui survei mikro-makro seperti konsumsi rumah tangga, tren ketahanan pangan, atau distribusi bantuan sosial. Meski demikian, kajian lintas-disipliner yang menggabungkan perspektif analisis wacana kritis dengan data kuantitatif dengan tujuan memahami bagaimana kemiskinan ekstrem dikonstruksi, dijaga, atau diartikulasikan dalam kebijakan dan media, masih sangat jarang. Selain itu, hanya sedikit studi yang mengintegrasikan data kuantitatif dengan analisis relasi kekuasaan, *framing* kebijakan, dan representasi publik, khususnya di konteks NTT. Hal ini menciptakan celah dalam literatur yang cenderung mengabaikan dimensi simbolik dan politik statistik kemiskinan.

Artikel ini bertujuan mengisi celah tersebut dengan pendekatan *Critical Discourse Analysis* (CDA), dipadukan dengan data kuantitatif yang terdiri dari angka kemiskinan umum dan ekstrem sebagai input empiris. Melalui pendekatan ini, artikel akan mengeksplorasi bagaimana wacana tentang kemiskinan ekstrem dibentuk, dikomunikasikan, dan diaplikasikan dalam kebijakan publik, serta bagaimana relasi kekuasaan memengaruhi konstruksi tersebut. Dalam tradisi akademik, CDA, seperti yang dijelaskan oleh Fairclough dan Wodak (1997), melihat bahwa bahasa dalam wacana bukan sekadar sistem linguistik, tetapi merupakan praktik sosial yang mencerminkan kekuasaan dan ideologi yang mengkarakterisasi objek kajian.

Dari segi tujuan, artikel ini secara spesifik ingin (1) menganalisis konstruksi wacana kemiskinan ekstrem dalam dokumen kebijakan dan media di tingkat nasional dan provinsi NTT; (2) menghubungkan hasil analisis wacana tersebut dengan indikator statistik kemiskinan (umum dan ekstrem) sebagai landasan empiris; (3) menelaah relasi kekuasaan dalam representasi kemiskinan ekstrem serta dampaknya terhadap efektivitas kebijakan pengentasan. Secara teoretis, artikel ini diharapkan memperluas penerapan CDA dalam kajian pembangunan dan ketimpangan sosial. Secara praktis, hasil artikel akan menyediakan rekomendasi bagi pembuat kebijakan khusus dalam merumuskan komunikasi publik dan kebijakan yang lebih responsif terhadap kompleksitas lokal, serta tidak mereduksi kemiskinan ekstrem menjadi sekadar angka statistik.

Received: 03 Desember 2025 | Accepted: 03 Februari 2025 | Published: 20 April 2026

TINJAUAN TEORI

Analisis Wacana Kritis (AWK) yang dikembangkan oleh Norman Fairclough (1995) berangkat dari pemahaman bahwa bahasa bukanlah medium yang netral, melainkan praktik sosial yang terikat dengan relasi kekuasaan dan ideologi. Bahasa tidak hanya merefleksikan realitas, tetapi juga berfungsi membentuk realitas sosial melalui proses representasi, seleksi, dan eksklusi makna tertentu. Dalam konteks ini, wacana berperan sebagai arena di mana kepentingan politik, ekonomi, dan sosial dinegosiasikan serta dipertahankan.

Fairclough mengajukan tiga dimensi analisis yang saling terkait: (1) deskripsi teks, (2) interpretasi praktik wacana, dan (3) eksplanasi praktik sosial. Pada dimensi deskripsi teks, analisis fokus pada struktur linguistik dan retoris yang digunakan, seperti pilihan kata (leksikon), metafora, dan konstruksi gramatikal yang menyiratkan dominasi atau eksklusi. Dalam wacana kemiskinan ekstrem, misalnya, penggunaan istilah *"zero extreme poverty"* dapat memberikan kesan finalitas yang menutupi keragaman pengalaman kemiskinan di tingkat lokal.

Dimensi interpretasi praktik wacana menekankan pada proses produksi dan konsumsi teks. Hal ini melibatkan analisis bagaimana dokumen kebijakan, laporan statistik, atau berita media tentang kemiskinan ekstrem diproduksi, diedarkan, dan diterima oleh publik. Dalam konteks Indonesia, terutama di Nusa Tenggara Timur (NTT), praktik ini sering kali melibatkan interaksi antara data kuantitatif —seperti angka kemiskinan umum sebesar 19,02% (BPS, 2025) dan kemiskinan ekstrem 3,93% (Kemenko PMK, 2023)— dengan narasi politik pembangunan nasional. Angka-angka tersebut tidak hanya menjadi rujukan teknokratis, tetapi juga alat persuasi publik yang mempengaruhi persepsi keberhasilan atau kegagalan program pengentasan kemiskinan.

Sementara itu, dimensi eksplanasi praktik sosial mengarahkan analisis pada konteks makro yang membentuk wacana, seperti struktur ekonomi-politik, ketimpangan kekuasaan lokal, dan agenda pembangunan global. Penetapan garis kemiskinan ekstrem berdasarkan standar US$ 1,90 PPP, meskipun mengacu pada konsensus internasional (World Bank, 2015), dapat berimplikasi pada normalisasi ukuran yang mengabaikan faktor kultural, sejarah ketergantungan pertanian subsisten, atau akses layanan dasar yang minim di daerah seperti NTT. Dengan demikian, wacana kemiskinan ekstrem tidak hanya memotret kondisi material, tetapi juga menciptakan kategori sosial seperti *"miskin ekstrem"* yang dapat

Received: 03 Desember 2025 | Accepted: 03 Februari 2025 | Published: 20 April 2026

menstigmatisasi kelompok tertentu sekaligus menjadi dasar legitimasi intervensi program bantuan sosial.

Dalam kajian kritis, kemiskinan dipahami bukan semata sebagai kekurangan pendapatan, melainkan sebagai konstruksi sosial yang diproduksi melalui statistik, kebijakan, dan media. Penetapan batas US$ 1,90 per hari, yang digunakan sebagai tolok ukur resmi penghapusan kemiskinan ekstrem periode 2020–2024, menunjukkan bagaimana indikator global diadopsi menjadi instrumen kebijakan nasional, meskipun konteks lokal sering kali jauh lebih kompleks. Wacana ini berpotensi mereduksi kerentanan sosial-ekonomi yang multidimensi menjadi angka tunggal yang lebih mudah dikomunikasikan, tetapi kurang menggambarkan realitas di lapangan terutama terkait resistensi sosial, relasi patronase, dan ketimpangan struktural yang bertahan di wilayah-wilayah prioritas seperti NTT.

Melalui pendekatan AWK, analisis terhadap wacana kemiskinan ekstrem dalam artikel ini dapat mengungkap:

1. Bagaimana realitas kemiskinan dikonstruksi melalui bahasa dan simbol statistik dalam dokumen resmi maupun media.
2. Siapa aktor dominan yang memiliki kewenangan untuk mendefinisikan kemiskinan ekstrem dan menentukan ambang batasnya.
3. Bagaimana relasi kekuasaan termanifestasi dalam penetapan, komunikasi, dan evaluasi kebijakan pengentasan.

Dengan demikian, penerapan AWK dalam artikel ini tidak hanya menganalisis teks secara linguistik, tetapi juga mengaitkannya dengan struktur sosial yang lebih luas. Hal ini sejalan dengan pandangan Fairclough dan Wodak (1997) yang menekankan bahwa wacana adalah bentuk praktik sosial yang dapat mempertahankan maupun menantang *status quo*. Dalam konteks NTT, AWK menjadi pendekatan strategis untuk membongkar reduksionisme angka dan mengusulkan pemahaman yang lebih holistik, sensitif terhadap kerentanan lokal, dan kritis terhadap ideologi pembangunan yang mendasari kebijakan penghapusan kemiskinan ekstrem.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain Analisis Wacana Kritis (AWK) yang berlandaskan kerangka teori Norman Fairclough (1995). Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap dimensi ideologis, relasi

Received: 03 Desember 2025 | Accepted: 03 Februari 2025 | Published: 20 April 2026

kekuasaan, dan praktik sosial yang membentuk wacana kemiskinan ekstrem di Nusa Tenggara Timur (NTT). Berbeda dengan metode kuantitatif yang berfokus pada pengukuran, AWK berupaya membedah makna, narasi, dan strategi representasi yang digunakan oleh aktor kebijakan maupun media.

Data yang dianalisis terbagi ke dalam dua kategori utama:

1. Dokumen kebijakan resmi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS NTT, 2024/2025), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK, 2024), serta Satuan Tugas Pengelola Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Satgas P3KE, 2023). Dokumen ini mencakup laporan angka kemiskinan umum dan ekstrem, pedoman penghapusan kemiskinan ekstrem, serta publikasi resmi yang digunakan dalam komunikasi kebijakan nasional.
2. Artikel media daring yang memuat isu kemiskinan ekstrem di NTT pada periode 2023–2025, dengan pemilihan media berdasarkan jangkauan nasional dan regional guna menangkap variasi framing antara pusat dan daerah.

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yakni dengan mengarsipkan teks-teks kebijakan dan pemberitaan yang relevan menggunakan kata kunci: *kemiskinan ekstrem, zero extreme poverty, NTT,* dan *penghapusan kemiskinan*. Data kemudian diorganisasi ke dalam basis tematik sesuai periode waktu dan sumber institusi untuk memudahkan proses analisis.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan tiga dimensi model Fairclough, yaitu:

1. Deskripsi teks, yang mengidentifikasi pilihan leksikal, metafora, struktur kalimat, dan retorika yang digunakan dalam dokumen kebijakan maupun pemberitaan, misalnya penggunaan istilah *zero extreme poverty* sebagai representasi target nasional.
2. Interpretasi praktik wacana, yang mengkaji aktor produksi dan distribusi wacana, seperti birokrasi pusat, pemerintah daerah, media, dan lembaga internasional, serta melihat bagaimana wacana tersebut diterima oleh publik melalui peliputan media daring.
3. Eksplanasi praktik sosial, yang menjelaskan keterkaitan wacana dengan konteks makro di NTT, termasuk struktur ekonomi-politik, ketimpangan layanan dasar, ketergantungan pada sektor pertanian subsisten, serta pengaruh norma global seperti ambang *US$ 1,90 PPP* (World Bank, 2015).

Received: 03 Desember 2025 | Accepted: 03 Februari 2025 | Published: 20 April 2026

Validitas dan kredibilitas data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai dokumen kebijakan, laporan statistik, dan artikel media. Proses interpretasi juga diperkuat melalui *peer debriefing* dengan pakar pembangunan daerah dan pemerhati kebijakan publik guna meminimalisasi bias peneliti.

Unit analisis penelitian ini adalah teks kebijakan dan pemberitaan mengenai kemiskinan ekstrem di NTT pada periode 2023–2025. Teks diperlakukan sebagai entitas diskursif yang tidak hanya mengandung informasi faktual, tetapi juga merefleksikan relasi kekuasaan, agenda pembangunan, dan strategi legitimasi.

Tabel 1. Kerangka Analisis Wacana Kritis (Fairclough, 1995)

Dimensi AWK	Kategori Analisis	Indikator Pengkodean	Contoh Kode
Deskripsi Teks	Pilihan Leksikon	Penggunaan istilah seperti *zero extreme poverty*, miskin ekstrem, keluarga prasejahtera	LX-01
Deskripsi Teks	Metafora/Label	Metafora seperti *memberantas kemiskinan*, *beban sosial*, *target nasional*	MF-01
Deskripsi Teks	Struktur Kalimat	Pemakaian kalimat pasif/aktif yang menyembunyikan atau menonjolkan aktor	SK-01
Interpretasi Praktik Wacana	Aktor Produksi	Identifikasi aktor pembuat wacana: pemerintah pusat, BPS, Kemenko PMK, Satgas P3KE	AP-01
Interpretasi Praktik Wacana	Kanal Distribusi	Jalur penyebaran wacana: media daring nasional, media lokal NTT	KD-01
Interpretasi Praktik Wacana	Resepsi Publik	Tanggapan publik, editorial media, komentar masyarakat	RP-01
Eksplanasi Praktik Sosial	Struktur Ekonomi-Politik	Ketimpangan akses layanan dasar, ketergantungan pertanian subsisten	SE-01
Eksplanasi Praktik Sosial	Ideologi Pembangunan	Narasi pertumbuhan ekonomi, target penghapusan kemiskinan ekstrem nasional	IP-01
Eksplanasi Praktik Sosial	Pengaruh Global	Penerapan standar *US$ 1,90 PPP*, arahan Bank Dunia, keterkaitan dengan SDGs	PG-01

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Teks

Narasi resmi mengenai kemiskinan ekstrem di Nusa Tenggara Timur (NTT) terutama didominasi oleh dua fokus besar yakni penurunan persentase dan target ambisius '*zero extreme poverty* 2024'. Data BPS mencatat tingkat kemiskinan umum NTT pada September 2024 sebesar 19,02% atau sekitar 1,11 juta orang, sementara Satgas Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) 2023 melaporkan angka kemiskinan ekstrem sebesar 3,93%, lebih tinggi

Received: 03 Desember 2025 | Accepted: 03 Februari 2025 | Published: 20 April 2026

dari rata-rata nasional. Angka-angka ini, meski tampak kecil, menyimpan kompleksitas karena penggunaan standar internasional US$1,90 PPP/hari yang cenderung mereduksi kerentanan multidimensi masyarakat.

Penggunaan istilah seperti 'penghapusan', '*nol persen*', dan '*zero extreme poverty*' memberikan nuansa finalitas serta janji politik. Dari sisi linguistik, struktur kalimat yang sering pasif (misalnya: 'kemiskinan ekstrem berhasil diturunkan menjadi 3,93%') cenderung mengaburkan aktor konkret di balik kebijakan tersebut. Hal ini menegaskan bahwa representasi kemiskinan ekstrem dibentuk melalui pilihan kata yang sarat ideologi.

Tabel 2. Statistik Kemiskinan NTT

Indikator	Nilai	Sumber
Kemiskinan Umum (Sept 2024)	19,02% (~1,11 juta orang)	BPS (2025)
Kemiskinan Ekstrem (Maret 2023)	3,93%	Satgas P3KE (2023)
Standar Internasional	US$ 1,90 PPP/hari	World Bank (2015)

Sumber: BPS Provinsi NTT (2024–2025); World Bank (2015)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur (2024–2025), tingkat kemiskinan di provinsi ini menunjukkan tren penurunan selama satu tahun terakhir. Persentase penduduk miskin tercatat sebesar 19,48% pada Maret 2024, menurun menjadi 19,02% pada September 2024, dan kembali turun menjadi 18,60% pada Maret 2025 atau setara dengan ±1,09 juta jiwa. Penurunan sebesar 0,88 poin persentase (pp) dari Maret 2024 ke Maret 2025 mencerminkan adanya perbaikan kondisi ekonomi secara agregat.

Namun demikian, kesenjangan kemiskinan antara wilayah perkotaan dan perdesaan masih mencolok. Pada Maret 2025, tingkat kemiskinan perdesaan mencapai 22,66%, jauh di atas kemiskinan perkotaan yang hanya 7,68%. Rata-rata anggota rumah tangga miskin tetap tinggi yakni 5,59 orang, sementara garis kemiskinan (GK) meningkat menjadi Rp549.607 per kapita per bulan, dengan 75,75% komponen GK dialokasikan untuk kebutuhan makanan. Estimasi pengeluaran minimum per rumah tangga miskin mencapai sekitar Rp3,07 juta per bulan.

Received: 03 Desember 2025 | Accepted: 03 Februari 2025 | Published: 20 April 2026

Tabel 3. Tren Kemiskinan NTT, Garis Kemiskinan, dan Kesenjangan Desa–Kota (2024–2025)

Periode	Tingkat Kemiskinan (%)	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bln)	Rata-rata Anggota RT Miskin	Estimasi GK/RT (Rp/bln)	Perkotaan (%)	Perdesaan (%)
Maret 2024	19,48	±1,15 juta	528.878	5,80	±3.067.000	8,10	23,30
September 2024	19,02	±1,11 juta	533.944	5,81	3.102.215	8,11	23,02
Maret 2025	18,60	±1,09 juta	549.607	5,59	3.072.303	7,68	22,66

Sumber: BPS Provinsi NTT (2024–2025)

Secara agregat, kondisi kemiskinan di NTT memperlihatkan tren perbaikan yakni tahun 2025 menunjukkan angka sebesar 18,60 % pada Maret, turun dari 19,02 % pada September 2024, dan 19,48 % pada Maret 2024 penurunan sebesar 0,88 poin persentase (pp) dalam satu tahun terakhir. Jumlah penduduk miskin saat ini diperkirakan sekitar ±1,09 juta jiwa. *Garis Kemiskinan* (GK) per kapita mencapai Rp 549.607/bulan, dengan komponen kebutuhan makanan menyumbang 75,75 %, dan estimasi pengeluaran minimum per RT miskin mencapai ±Rp 3,07 juta per bulan. Kesenjangan antara wilayah pedesaan dan perkotaan masih nyata yakni kemiskinan desa pada Maret 2025 sebesar 22,66 %, jauh lebih tinggi dibanding kota (7,68 %).

2. Interpretasi Praktik Wacana

Produksi wacana kemiskinan ekstrem dikendalikan oleh aktor-aktor pusat seperti BPS, Kemenko PMK, dan Satgas P3KE. Distribusi wacana dilakukan melalui laporan resmi dan pemberitaan media nasional maupun lokal. Resepsi publik terbagi dua yakni audiens pro-pemerintah yang menafsirkan angka menurun sebagai bukti keberhasilan program, dan pihak skeptis (akademisi, LSM, jurnalis lokal) yang menyoroti keterbatasan standar US$1,90 PPP, akurasi data mikro, serta jurang antara statistik dan realitas keseharian masyarakat.

Tabel 4. Produksi, Distribusi, dan Resepsi Wacana

Aspek	Keterangan	Contoh
Produksi	Dikendalikan oleh aktor pusat (BPS, Kemenko PMK, Satgas P3KE)	Laporan resmi, pedoman kebijakan
Distribusi	Melalui media nasional dan lokal	Artikel daring, berita media NTT
Resepsi	Audiens optimis vs skeptis	Publik pro-pemerintah vs LSM/akademisi

Received: 03 Desember 2025 | Accepted: 03 Februari 2025 | Published: 20 April 2026

3. Eksplanasi Praktik Sosial

Pada level praktik sosial, kemiskinan ekstrem di NTT dipengaruhi oleh tiga faktor utama: (1) struktur ekonomi yang rapuh dengan ketergantungan pada pertanian subsisten dan keterbatasan layanan dasar; (2) politik targetisasi, di mana target nol persen 2024 berfungsi sebagai instrumen legitimasi politik sekaligus penyederhanaan masalah; dan (3) dominasi pemerintah pusat dalam menentukan definisi dan indikator kemiskinan ekstrem. Akibatnya, masyarakat lokal dan pemerintah daerah hanya diposisikan sebagai penerima intervensi, bukan sebagai aktor utama.

Tabel 5. Eksplanasi Praktik Sosial terhadap Kemiskinan Ekstrem di NTT

Faktor	Sub-Faktor / Indikator	Deskripsi / Data Relevan	Sumber
Struktur Ekonomi yang Rapuh	Ketergantungan pada Pertanian Subsisten	Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mendominasi struktur ekonomi NTT, dengan kontribusi sebesar 29,31% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2023.	NTT Provinsi, 2023
	Keterbatasan Akses Layanan Dasar	Akses terhadap infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih, dan layanan publik lainnya memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di NTT.	Journal of STIEMB, 2023
Politik Targetisasi dan Legitimasi Politik	Target "Zero Extreme Poverty"	Pemerintah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia mendekati 0% pada tahun 2024, menjadikan target ini instrumen legitimasi politik sekaligus tolok ukur keberhasilan program.	RRI, 2024
	Standar Garis Kemiskinan Ekstrem	Penggunaan standar internasional US$1,90 per hari (PPP) untuk menentukan batas kemiskinan ekstrem, yang menjadi acuan resmi pemerintah dalam penghitungan dan pelaporan.	NextPolicy, 2023
Dominasi Pemerintah Pusat dalam Penentuan Definisi dan Indikator	Peran Pemerintah Pusat	Pemerintah pusat melalui BPS dan Kemenko PMK memegang otoritas utama dalam menetapkan definisi, indikator, dan strategi pengentasan kemiskinan ekstrem di NTT.	Kemenko PMK, 2023
	Data Kemiskinan Ekstrem	Data resmi Satgas Data P3KE menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan ekstrem di NTT masih cukup tinggi, yaitu 3,93% pada Maret 2023.	Satgas P3KE / Kemenko PMK, 2023

Received: 03 Desember 2025 | Accepted: 03 Februari 2025 | Published: 20 April 2026

4. Visualisasi Data dan Relasi Wacana

Untuk memperkuat pemahaman hasil sajian sebelumnya, berikut ditambahkan visualisasi berupa grafik tren kemiskinan umum dan ekstrem di NTT serta diagram relasi aktor wacana. Grafik memberikan gambaran dinamika kuantitatif, sementara diagram menjelaskan distribusi kekuasaan dan alur produksi wacana.

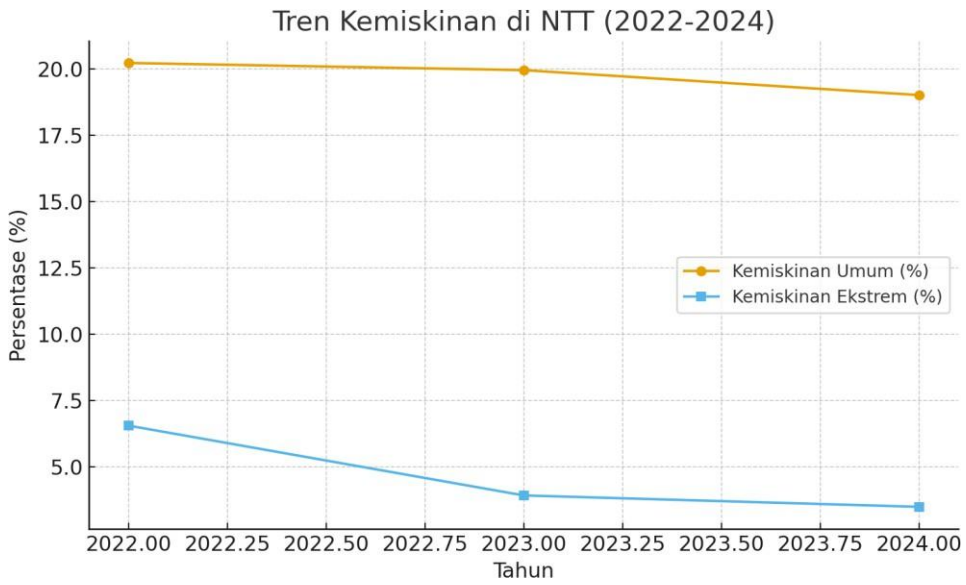

Gambar 1. Tren Kemiskinan Umum dan Ekstrem di NTT (2022-2024)

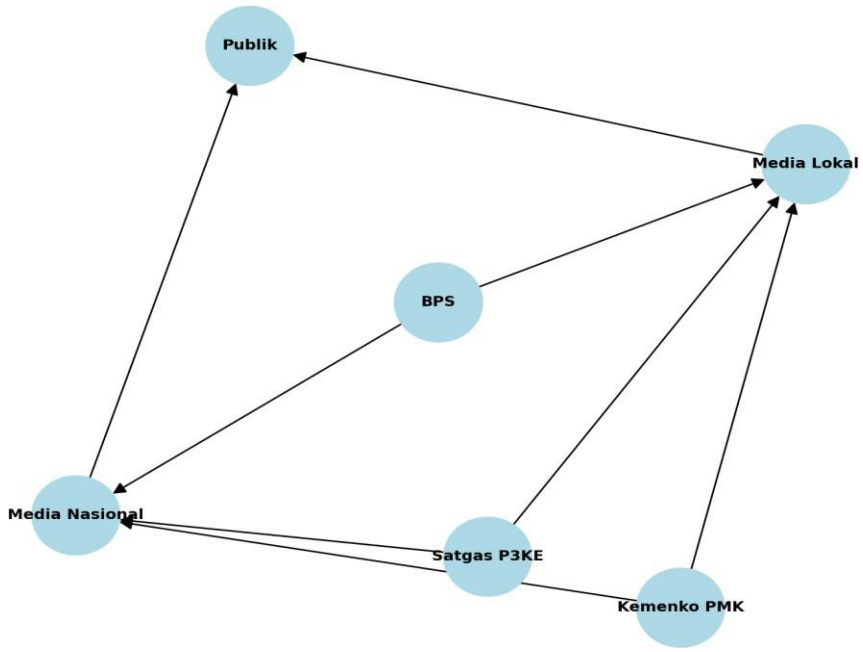

Gambar 2. Diagram Relasi Aktor Wacana Kemiskinan Ekstrem di NTT

Received: 03 Desember 2025 | Accepted: 03 Februari 2025 | Published: 20 April 2026

5. Framing Media Daring

Untuk menganalisis konstruksi wacana kemiskinan ekstrem di NTT, dikumpulkan artikel daring dari media nasional dan regional pada periode 2023–2025. Tabel di bawah menyajikan pilihan sumber, kutipan/angka penting, serta ringkas framing yang diamati (pusat vs. daerah). Data statistik utama yang sering dikutip meliputi: persentase kemiskinan umum Provinsi NTT (Sept 2024) = 19,02% (≈1,11 juta orang) dan estimasi kemiskinan ekstrem Satgas P3KE (Maret 2023) = 3,93%.

Tabel 6. Kutipan Bukti Media Daring

No.	Media & Tanggal	Judul / Bentuk	Kutipan kunci / Angka	Framing (ringkas)
1	Kemenko PMK (publikasi resmi, 2023–2025)	Press release / Kebijakan koordinasi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem	Menyebut estimasi Satgas P3KE: kemiskinan ekstrem NTT Maret 2023 = 3,93%	Framing teknokratis & pemerintah-sentris; menekankan target dan sinergi antar-kementerian.
2	ANTARA News (4 Sept 2024)	Berita nasional — capaian penurunan kemiskinan ekstrem	Melaporkan capaian penurunan dan upaya percepatan menuju nol persen (nasional).	Framing nasional yang optimis; menonjolkan capaian dan target 'mendekati nol'.
3	Tempo.co (2024)	Artikel analitis/berita — strategi dan metode pengukuran	Mengutip angka NTT (3,93%) dan membahas metode pengukuran serta strategi pengentasan.	Framing kebijakan: kombinasi teknis dan analitis; menyorot keterbatasan metodologis.
4	iNews (regional NTT, 2024–2025)	Liputan kabupaten — capaian tingkat kabupaten (contoh: Manggarai, Alor)	Mengutip penurunan kemiskinan di beberapa kabupaten berdasarkan data Satgas/BPS wilayah.	Framing lokal: menonjolkan capaian kabupaten; tone positif namun berbasis data lokal.
5	RadarFlores / OborTimur / SuaraMerdeka (regional NTT, 2024–2025)	Berita lokal — variasi spasial & kabupaten termiskin	Mengangkat kondisi kabupaten tertentu yang masih tinggi tingkat kemiskinannya (mis. Sumba Tengah).	Framing kritis/kontekstual: menyorot ketimpangan internal NTT dan kasus lokal yang memerlukan perhatian.

Analisis wacana kritis terhadap narasi kemiskinan ekstrem di Nusa Tenggara Timur (NTT) memperlihatkan bahwa isu ini bukan sekadar permasalahan ekonomi, melainkan sebuah konstruksi diskursif yang diproduksi melalui relasi kuasa-pengetahuan antara pemerintah pusat, lembaga statistik, media, dan aktor lokal. Mengacu pada kerangka Fairclough (1995), tiga dimensi analisis yakni

Received: 03 Desember 2025 | Accepted: 03 Februari 2025 | Published: 20 April 2026

deskripsi teks, interpretasi praktik wacana, dan eksplanasi praktik sosial menunjukkan keterjalinan erat antara bahasa, data statistik, serta ideologi pembangunan.

Pada dimensi deskripsi teks, terlihat bahwa pilihan leksikon teknokratis (*zero extreme poverty*, miskin ekstrem), metafora militeristik (memberantas, target nasional), dan struktur kalimat pasif membentuk citra negara sebagai aktor tunggal yang mampu "menghapus" kemiskinan. Strategi linguistik ini bersifat ideologis, ia menormalisasi klaim keberhasilan sekaligus mengaburkan kompleksitas struktural dan peran aktor lain.

Pada dimensi interpretasi praktik wacana, produksi dan distribusi wacana didominasi lembaga pusat (BPS, Kemenko PMK, Satgas P3KE) yang mengendalikan otoritas epistemik melalui indikator kuantitatif (US$1,90 PPP). Media nasional cenderung mereproduksi narasi keberhasilan berbasis angka, sementara media regional NTT lebih beragam: ada yang menonjolkan capaian kabupaten, namun juga menyoroti daerah yang tetap miskin atau keterbatasan struktural. Resepsi publik pun terbelah antara kelompok pro-pemerintah yang melihat data sebagai bukti sukses, dan kalangan kritis (akademisi, LSM, media lokal) yang menilai angka tidak mewakili realitas keseharian.

Pada dimensi eksplanasi praktik sosial, wacana kemiskinan ekstrem berakar pada: (1) kondisi struktural ekonomi-politik NTT (ketergantungan pada pertanian subsisten, keterbatasan infrastruktur, kerentanan iklim), (2) ideologi pembangunan yang mengedepankan target kuantitatif sebagai legitimasi politik, dan (3) tekanan global melalui standar Bank Dunia dan SDGs. Dengan demikian, penurunan angka kemiskinan ekstrem lebih mencerminkan performativitas kebijakan dan simbolisme politik ketimbang transformasi substantif.

Sintesis dari ketiga dimensi ini menegaskan adanya "fetisisme statistik" dimana keberhasilan pembangunan direduksi pada capaian persentase kemiskinan, sementara pengalaman nyata masyarakat akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, dan partisipasi sosial terpinggirkan. Kritik ini membuka ruang bagi alternatif pendekatan yaitu (1) kapabilitas (Sen, 1999), yang menekankan kebebasan dan kemampuan nyata individu untuk hidup bermartabat; (2) partisipasi lokal (Chambers, 1997), yang menempatkan masyarakat miskin sebagai subjek pengetahuan dan perumusan kebijakan; serta (3) multidimensionalitas

Received: 03 Desember 2025 | Accepted: 03 Februari 2025 | Published: 20 April 2026

kemiskinan (Alkire & Foster, 2011), yang mengakui bahwa kemiskinan melampaui sekadar pendapatan.

Bukti dari media dan data 2023–2025 memperkuat temuan ini:

1. Media nasional (Kemenko PMK, ANTARA, Tempo) menonjolkan target dan capaian angka → memperlihatkan orientasi teknokratis-legitimatif.
2. BPS NTT menjadi rujukan utama data kuantitatif (angka anchor) → menegaskan sentralitas statistik dalam narasi.
3. Media regional (iNews, Radar Flores, OborTimur) mengungkap variasi lokal → menunjukkan adanya jurang makna antara pusat dan daerah.
4. Standar internasional (US$1,90 PPP, SDGs) → membuktikan pengaruh global dalam membentuk definisi "kemiskinan ekstrem" di Indonesia.

Dengan demikian, narasi resmi kemiskinan ekstrem di NTT lebih tepat dipahami sebagai arena kontestasi makna ketimbang fakta objektif. Ia berfungsi sebagai instrumen legitimasi negara, sekaligus menutup kompleksitas struktural dan pengalaman lokal. Pergeseran ke pendekatan kapabilitas, partisipasi, dan multidimensi menjadi krusial agar kebijakan pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada angka, tetapi benar-benar menghadirkan perubahan substantif bagi kehidupan masyarakat miskin di NTT.

Analisis Kritis atas Kuasa, Statistik, dan Legitimasi Politik

Narasi resmi mengenai kemiskinan ekstrem di Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak dapat dilepaskan dari strategi diskursif yang dibentuk pemerintah pusat melalui dokumen kebijakan, laporan statistik, dan pemberitaan media. Mengacu pada kerangka Analisis Wacana Kritis (AWK) Fairclough (1995), wacana tersebut dapat dianalisis melalui tiga dimensi utama yakni deskripsi teks, interpretasi praktik wacana, dan eksplanasi praktik sosial. Ketiga dimensi ini saling terkait dan memperlihatkan bagaimana bahasa, angka statistik, dan relasi kuasa bekerja bersama dalam membentuk representasi kemiskinan ekstrem sebagai persoalan pembangunan (Fairclough, 1995; Wodak & Meyer, 2016).

Received: 03 Desember 2025 | Accepted: 03 Februari 2025 | Published: 20 April 2026

Tabel 7. Kerangka Analisis Wacana Kritis (Fairclough, 1995) dalam Representasi Kemiskinan Ekstrem di NTT

Dimensi AWK	Kategori Analisis	Indikator Pengkodean	Kode	Temuan/Contoh Konkret
Deskripsi Teks	Pilihan Leksikon	Penggunaan istilah teknokratis dalam kebijakan	LX-01	"*zero extreme poverty*", "miskin ekstrem", "keluarga prasejahtera"
Deskripsi Teks	Metafora/Label	Metafora yang membingkai kemiskinan sebagai musuh atau beban	MF-01	"memberantas kemiskinan", "beban sosial", "target nasional"
Deskripsi Teks	Struktur Kalimat	Pemakaian kalimat pasif/aktif yang menyembunyikan atau menonjolkan aktor	SK-01	"kemiskinan ekstrem berhasil diturunkan menjadi 3,93%"
Interpretasi Praktik Wacana	Aktor Produksi	Identifikasi aktor pusat pembuat wacana	AP-01	Pemerintah pusat: BPS, Kemenko PMK, Satgas P3KE
Interpretasi Praktik Wacana	Kanal Distribusi	Jalur penyebaran wacana melalui media dan laporan resmi	KD-01	Media daring nasional, laporan BPS, pemberitaan media lokal NTT
Interpretasi Praktik Wacana	Resepsi Publik	Tanggapan publik, kritik, atau penerimaan terhadap narasi resmi	RP-01	Publik pro-pemerintah optimis vs akademisi/LSM/jurnalis lokal yang skeptis
Eksplanasi Praktik Sosial	Struktur Ekonomi-Politik	Kondisi struktural yang melatari kemiskinan	SE-01	Ketergantungan pada pertanian subsisten, keterbatasan layanan dasar, kerentanan iklim
Eksplanasi Praktik Sosial	Ideologi Pembangunan	Orientasi kebijakan pembangunan berbasis target kuantitatif	IP-01	Narasi "penghapusan kemiskinan ekstrem nasional" sebagai legitimasi politik
Eksplanasi Praktik Sosial	Pengaruh Global	Keterkaitan dengan agenda dan standar internasional	PG-01	Adopsi standar US$1,90 PPP dari Bank Dunia, integrasi dengan SDGs

Pada dimensi **deskripsi teks**, terdapat sejumlah kategori analisis yang memperlihatkan konstruksi ideologis dalam bahasa kebijakan. Pertama, pilihan leksikon (LX-01) yang menonjolkan istilah teknokratis seperti *zero extreme poverty, miskin ekstrem, keluarga prasejahtera*. Pemakaian istilah tersebut bukan sekadar netral, melainkan mengandung pesan politis bahwa kemiskinan dapat dihapus secara total melalui intervensi negara. Hal ini sejalan dengan pandangan Bourdieu (1991) bahwa bahasa kebijakan selalu mengandung kekuatan simbolik untuk melegitimasi tatanan sosial tertentu. Kedua, penggunaan metafora atau label (MF-01) seperti *memberantas kemiskinan, beban sosial, target nasional* mengubah persoalan struktural menjadi narasi perjuangan yang bersifat militeristik dan finalistik. Lakoff &

Received: 03 Desember 2025 | Accepted: 03 Februari 2025 | Published: 20 April 2026

Johnson (1980) menunjukkan bahwa metafora bukan sekadar gaya bahasa, tetapi instrumen kognitif yang membentuk cara masyarakat memahami realitas sosial. Dalam konteks ini, kemiskinan dibingkai sebagai "musuh" yang harus dilawan, bukan sebagai gejala struktural dari ketimpangan. Ketiga, struktur kalimat (SK-01) dalam dokumen resmi cenderung pasif, misalnya *"kemiskinan ekstrem berhasil diturunkan menjadi 3,93%"*. Pola ini menyembunyikan agensi konkret di balik pencapaian tersebut, mengaburkan peran pemerintah daerah dan masyarakat lokal, sekaligus menegaskan dominasi negara sebagai satu-satunya aktor kunci dalam proses pengentasan. Hal ini sesuai dengan analisis van Dijk (2008) tentang strategi kebahasaan elit politik yang kerap mengaburkan tanggung jawab aktor tertentu.

Dimensi kedua, **interpretasi praktik wacana**, berfokus pada bagaimana teks tersebut diproduksi, didistribusikan, dan diterima oleh publik. Dalam aspek produksi (AP-01), aktor utama adalah lembaga pemerintah pusat, yaitu BPS, Kemenko PMK, dan Satgas P3KE, yang memonopoli otoritas epistemik dalam menentukan indikator kemiskinan ekstrem. Sebagaimana ditegaskan Foucault (1980), aktor yang mengendalikan produksi pengetahuan juga menguasai definisi "kebenaran" sosial. Kanal distribusi (KD-01) berlangsung melalui media daring nasional dan lokal, laporan resmi, serta dokumen internal kebijakan yang kemudian disirkulasikan untuk konsumsi publik. Distribusi ini menciptakan kesan obyektivitas dan transparansi, padahal sesungguhnya sarat dengan seleksi diskursif yang mengutamakan citra keberhasilan. Hal ini memperlihatkan bahwa media berperan sebagai agen reproduksi hegemoni (Herman & Chomsky, 1988), karena wacana pemerintah diposisikan sebagai suara dominan. Resepsi publik (RP-01) terbagi di satu sisi, kelompok pro-pemerintah memaknai penurunan angka kemiskinan ekstrem sebagai tanda sukses program nasional. Di sisi lain, kalangan kritis seperti akademisi, LSM, dan media lokal justru menyoroti keterbatasan standar US$1,90 PPP, ketidakakuratan data mikro, serta jurang yang lebar antara statistik resmi dengan realitas hidup masyarakat miskin di NTT. Kritik ini sejalan dengan argumen Reddy & Pogge (2010) bahwa garis kemiskinan global Bank Dunia terlalu sempit dan tidak menggambarkan kondisi riil masyarakat miskin. Perbedaan resepsi ini menunjukkan bahwa wacana kemiskinan ekstrem adalah arena kontestasi makna, bukan sekadar fakta objektif. Dalam konteks tersebut persoalan utama bukan hanya soal pendapatan uang tunai, melainkan juga keterbatasan akses terhadap air bersih, pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur dasar. Dengan kata lain, meskipun secara

Received: 03 Desember 2025 | Accepted: 03 Februari 2025 | Published: 20 April 2026

statistik seseorang mungkin dikategorikan "tidak miskin ekstrem" karena pendapatannya sedikit di atas garis US$1,90, kenyataan hidupnya tetap penuh dengan kerentanan.

Selain itu, masalah ketidakakuratan data mikro menjadi sorotan penting. Data resmi pemerintah kerap berbeda dengan realitas lapangan. Misalnya, ada keluarga yang secara administratif tidak tercatat sebagai miskin sehingga tidak mendapat bantuan sosial, padahal kondisi hidup mereka sangat memprihatinkan. Sebaliknya, ada pula keluarga yang masih terdaftar sebagai penerima bantuan meski kondisinya sudah relatif lebih baik. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai validitas data, sekaligus memperlihatkan adanya jurang lebar antara angka statistik dan kehidupan nyata masyarakat miskin.

Jurang tersebut semakin jelas ketika media lokal mengangkat kisah konkret warga NTT yang hidup dengan keterbatasan pangan, sulit mendapatkan pekerjaan layak, atau harus berjalan jauh hanya untuk mengakses air bersih. Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa meski angka resmi menyatakan penurunan kemiskinan, masyarakat masih berhadapan dengan tantangan struktural yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan berbasis angka. Dengan demikian, kemiskinan ekstrem tidak bisa dipandang hanya sebagai fakta objektif yang "selesai di atas kertas," melainkan juga sebagai konstruksi sosial-politik yang terus diperdebatkan dan diperebutkan.

Dimensi ketiga, **eksplanasi praktik sosial**, menjelaskan konteks sosial, ekonomi, dan politik yang melatari kemunculan wacana kemiskinan ekstrem. Pertama, struktur ekonomi-politik (SE-01) di NTT ditandai oleh ketergantungan pada pertanian subsisten, keterbatasan akses layanan dasar (pendidikan, kesehatan, infrastruktur), serta tingginya kerentanan iklim. Kondisi ini menunjukkan bahwa penurunan angka statistik tidak serta merta mencerminkan perbaikan struktural. Lebih jauh, data multidimensional menunjukkan bahwa 34,80% penduduk NTT masih tergolong miskin multidimensi, dan 10,25% sangat miskin; dengan dimensi kesehatan (49%), standar hidup (31%), dan pendidikan (20%) sebagai kontributor terbesar (Ledhe, 2024). Fakta ini memperkuat kritik terhadap reduksi kemiskinan menjadi sekadar angka moneter. Kedua, ideologi pembangunan (IP-01) yang melatari wacana tersebut mengacu pada paradigma pertumbuhan ekonomi dan targetisasi kuantitatif, seperti "penghapusan kemiskinan ekstrem nasional". Target ambisius nol persen berfungsi sebagai instrumen legitimasi politik sekaligus menyederhanakan

Received: 03 Desember 2025 | Accepted: 03 Februari 2025 | Published: 20 April 2026

masalah kompleks menjadi capaian numerik yang mudah dikomunikasikan. Ferguson (1994) menyebut fenomena ini sebagai *anti-politics machine*, di mana pembangunan direduksi menjadi proyek teknokratis dan mengabaikan akar ketimpangan struktural. Ketiga, pengaruh global (PG-01) sangat kuat melalui penerapan standar US$1,90 PPP yang diadopsi dari Bank Dunia dan diintegrasikan dalam agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs). Hal ini menunjukkan bahwa wacana kemiskinan ekstrem di Indonesia tidak sepenuhnya lahir dari konteks lokal, melainkan dari tekanan normatif internasional yang membentuk arah kebijakan domestik.

Integrasi ketiga dimensi AWK ini menegaskan bahwa wacana kemiskinan ekstrem di NTT tidak bisa dipahami hanya sebagai upaya teknis pengukuran, melainkan sebagai praktik sosial-politik yang berfungsi membangun legitimasi. Pilihan kata dan metafora (LX-01, MF-01), struktur kalimat (SK-01), otoritas aktor pusat (AP-01), kanal distribusi media (KD-01), resepsi publik yang terbelah (RP-01), kondisi struktural ekonomi (SE-01), ideologi pembangunan yang hegemonik (IP-01), serta pengaruh global dari lembaga internasional (PG-01) seluruhnya membentuk suatu ekosistem wacana yang kompleks. Ekosistem ini beroperasi dengan logika kuasa-pengetahuan (Foucault, 1980), di mana aktor yang memproduksi pengetahuan memiliki kuasa untuk menentukan definisi realitas sosial, sekaligus mengendalikan cara publik memahami dan merespons kemiskinan.

Dengan demikian, pembahasan ini memperlihatkan bahwa kemiskinan ekstrem di NTT bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga hasil konstruksi diskursif yang berimplikasi langsung terhadap efektivitas kebijakan pengentasan. Target "*zero extreme poverty*" dapat berfungsi sebagai mobilisasi simbolik politik pembangunan, namun sekaligus berisiko menutup ruang bagi partisipasi lokal dan mengabaikan kompleksitas multidimensi yang dihadapi masyarakat miskin.

Selama ini, ukuran keberhasilan pembangunan sering hanya dilihat dari angka-angka statistik, misalnya berapa persen kemiskinan berhasil diturunkan. Cara pandang ini disebut sebagai "fetisisme statistik" yang dikembangkan oleh Desrosières (1990an) dan kemudian dipakai luas oleh ilmuwan pembangunan seperti Jerven (2013) untuk mengkritisi kebijakan berbasis angka. Cara pandang tersebut menganggap angka lebih penting daripada kenyataan hidup orang sehari-hari. Padahal, angka kemiskinan bisa saja menurun, tetapi banyak orang masih kesulitan sekolah, berobat, atau mendapatkan pekerjaan yang layak. Karena itu, dibutuhkan pergeseran cara pandang:

Received: 03 Desember 2025 | Accepted: 03 Februari 2025 | Published: 20 April 2026

1. Pendekatan berbasis kapabilitas (Sen, 1999), yakni pembangunan harus dilihat dari kemampuan nyata orang untuk hidup bermartabat. Misalnya, apakah mereka bisa memilih pekerjaan yang diinginkan, mengakses layanan kesehatan, atau berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Jadi, bukan sekadar apakah mereka punya Rp20.000 per hari untuk makan.
2. Partisipasi lokal (Chambers, 1997), yakni kebijakan pengentasan kemiskinan harus mendengarkan suara orang miskin itu sendiri. Mereka tahu masalah sehari-hari yang mereka hadapi, seperti sulitnya air bersih, jalan rusak, atau biaya sekolah yang mahal. Kalau mereka dilibatkan, solusi akan lebih sesuai kebutuhan nyata, bukan sekadar program dari atas.
3. Dimensi multidimensional kemiskinan (Alkire & Foster, 2011), yakni kemiskinan bukan cuma soal uang. Orang bisa tidak miskin secara pendapatan, tapi tetap miskin karena tidak bisa sekolah, tidak punya listrik, atau tidak punya akses air bersih. Jadi, pengukuran kemiskinan harus mencakup banyak aspek, bukan hanya satu garis batas pendapatan.

Gambar 3. Konstruksi Diskursif Kemiskinan Ekstrem

Dengan kata lain, pembangunan yang baik bukan hanya mengejar angka-angka indah di laporan, tetapi memastikan bahwa orang benar-benar merasakan perubahan dalam hidup mereka menjadi lebih sehat, lebih berpendidikan, lebih sejahtera, dan lebih bebas mengambil keputusan tentang masa depan mereka. Analisis wacana kritis dengan kerangka Fairclough membantu membuka tabir relasi kuasa dalam produksi

Received: 03 Desember 2025 | Accepted: 03 Februari 2025 | Published: 20 April 2026

pengetahuan tentang kemiskinan, dan dengan demikian berkontribusi penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih adil dan substantif.

KESIMPULAN

Analisis wacana kritis menunjukkan bahwa kemiskinan ekstrem di Nusa Tenggara Timur (NTT) bukan sekadar masalah ekonomi, melainkan konstruksi sosial-politik yang dibentuk melalui bahasa, statistik, dan relasi kuasa. Narasi resmi yang menekankan target "*zero extreme poverty* 2024" dan penurunan angka menjadi 3,93% menampilkan negara sebagai aktor utama, sementara masyarakat lokal dan pemerintah daerah lebih diposisikan sebagai penerima intervensi.

Pilihan kata teknokratis, metafora militeristik, dan kalimat pasif memperkuat legitimasi politik dan menyembunyikan kompleksitas struktural. Produksi dan distribusi wacana dikendalikan lembaga pusat seperti BPS, Kemenko PMK, dan Satgas P3KE, dengan media nasional menyoroti keberhasilan angka, sedangkan media lokal memperlihatkan variasi kondisi di kabupaten. Publik terbagi antara yang pro-pemerintah dan kalangan kritis yang menyoroti keterbatasan standar US$1,90 PPP dan ketimpangan realitas lokal.

Kemiskinan ekstrem di NTT dipengaruhi oleh struktur ekonomi rapuh, ketergantungan pada pertanian subsisten, keterbatasan layanan dasar, politik targetisasi sebagai legitimasi politik, dan dominasi pemerintah pusat dalam menentukan definisi serta indikator kemiskinan. Penurunan angka lebih mencerminkan simbolisme politik daripada perbaikan nyata, menunjukkan adanya "fetisisme statistik".

Untuk mengatasi hal ini, pendekatan pengentasan kemiskinan perlu berfokus pada kapabilitas individu (Sen, 1999), partisipasi masyarakat lokal (Chambers, 1997), dan pengukuran multidimensional (Alkire & Foster, 2011). Pemerintah daerah harus diberdayakan dalam perencanaan dan pelaksanaan program, data harus akurat dan transparan, serta standar internasional diselaraskan dengan konteks lokal. Dengan cara ini, pembangunan tidak hanya mengejar angka statistik, tetapi benar-benar meningkatkan kualitas hidup, partisipasi sosial, dan kemampuan masyarakat miskin untuk menentukan masa depan mereka secara mandiri.

Received: 03 Desember 2025 | Accepted: 03 Februari 2025 | Published: 20 April 2026

DAFTAR PUSTAKA

Alkire, S., & Foster, J. (2011). Counting and multidimensional poverty measurement. *Journal of Public Economics, 95*(7–8), 476–487. Amsterdam: Elsevier. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2010.11.006

Badan Pusat Statistik. (2025). *Profil kemiskinan di Indonesia September 2024*. Jakarta: BPS RI.

Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2024/2025). *Statistik kemiskinan NTT*. Kupang: BPS NTT.

Chambers, R. (1997). *Whose reality counts? Putting the first last*. London: Intermediate Technology Publications.

Fairclough, N. (1995). *Critical discourse analysis: The critical study of language*. London: Longman.

Fairclough, N., & Wodak, R. (1997). Critical discourse analysis. In T. A. van Dijk (Ed.), *Discourse as social interaction* (pp. 258–284). London: Sage.

Foucault, M. (1980). *Power/knowledge: Selected interviews and other writings 1972–1977*. New York: Pantheon Books.

Herman, E. S., & Chomsky, N. (1988). *Manufacturing consent: The political economy of the mass media*. New York: Pantheon Books.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2023). *Laporan pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE)*. Jakarta: Kemenko PMK.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2024). *Publikasi resmi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem*. Jakarta: Kemenko PMK.

Ledhe, D. (2024). *Analisis kemiskinan multidimensi di NTT*. Kupang: Universitas Nusa

Received: 03 Desember 2025 | Accepted: 03 Februari 2025 | Published: 20 April 2026

Cendana Press.

Satgas P3KE. (2023). *Data kemiskinan ekstrem Maret 2023*. Jakarta: Kemenko PMK.

Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford: Oxford University Press.

Wodak, R., & Meyer, M. (2016). *Methods of critical discourse studies* (3rd ed.). London: Sage.

World Bank. (2015). *Ending extreme poverty and sharing prosperity: Progress and policies*.

Washington, DC: World Bank.

MEDIA DARING

ANTARA News. 2024. "Moving Closer to Zero Extreme Poverty." Antara News. https://en.antaranews.com/news/324787/moving-closer-to-zero-extreme-poverty?utm (diakses pada 11 Juni 2025).

Tempo.co. 2024. "Strategi Mengatasi Kemiskinan Ekstrem." Tempo.co. https://www.tempo.co/info-tempo/strategi-mengatasi-kemiskinan-ekstrem-453501?utm (diakses pada 12 Juni 2025).

iNewsAlor.id. 2024. "Angka Kemiskinan Ekstrim di Manggarai Timur Turun Signifikan,

Berikut Daftar Kabupaten di NTT." iNewsAlor.id. https://alor.inews.id/read/491423/angka-kemiskinan-ekstrim-di-manggarai-timur-turun-signifikan-berikut-daftar-kabupaten-di-ntt?utm (diakses pada 31 Juni 2025).

OborTimur.com. 2025. "Kabupaten Ini Masih Termiskin di NTT Meski Angka Kemiskinan

Turun, Apa yang Salah dan Siapa Bertanggung Jawab?" OborTimur.com. https://www.obortimur.com/daerah/1785947526/kabupaten-ini-masih-termiskin-di-ntt-meski-angka-kemiskinan-turun-apa-yang-salah-dan-siapa-bertanggung-jawab?utm= (diakses pada 31 Juni 2025).

Radarflores.com. 2025. "NTT Perangi Stunting dan Kemiskinan Ekstrem melalui Gerakan

Terpadu dan Bantuan Sosial." Radarflores.com. https://www.radarflores.com/kupang/berita/ntt-perangi-stunting-dan-kemiskinan-ekstrem-melalui-gerakan-terpadu-dan-bantuan-sosial?utm (diakses pada 31 Juni 2025).

Received: 03 Desember 2025 | Accepted: 03 Februari 2025 | Published: 20 April 2026

Suara Merdeka NTT. 2025. "Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi NTT Mengalami Penurunan." Suara Merdeka NTT. https://ntt.suaramerdeka.com/news/103715621368/jumlah-penduduk-miskin-di-provinsi-ntt-mengalami-penurunan?utm (diakses pada 31 Juni 2025).